

ABSTRAK

Nama Mahasiswa : Toharudin

Program Studi : Magister Kenotariatan

Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah yang tetap dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai guna bagi pelunasan uang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya. Eksekusi Jaminan Fidusia diatur dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang Tentang Jaminan Fidusia. Eksekusi Jaminan Fidusia adalah penyitaan dan penjualan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dikarenakan debitur cedera janji atau tidak memenuhi prestasinya tepat waktu kepada kreditor. Agar penulisan terarah, maka rumusan masalah sebagai berikut : Bagaimana eksekusi jaminan fidusia terhadap debitur cedera janji. (eksekusi objek jaminan fidusia sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Nomor 2/PUU-XIX/2021), Bagaimana kepastian hukum terhadap eksekusi objek jaminan fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Dan Nomor 2/PUU-XIX/2021. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah yuridis normatif, artinya dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Penelitian hukum normatif ini didasarkan kepada bahan hukum primer dan sekunder, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Kesimpulan dari penulisan ini sebagai berikut: Prosedur pemberian kredit dengan jaminan fidusia adalah serangkaian kegiatan yang saling terkait untuk menyelesaikan suatu pekerjaan yaitu menyalurkan kredit kepada pihak yang membutuhkan pembiayaan. Adanya prosedur pemberian kredit diterapkan untuk mengetahui layak atau tidaknya calon debitur diberikan kredit pembiayaan, sehingga resiko terhadap kredit macet dapat diminimalisir sekecil mungkin; Kedudukan jaminan fidusia apabila terjadi cedera janji. Penerima Fidusia berhak mengambil benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dan apabila perlu dapat meminta bantuan pihak yang berwenang. Eksekusi jaminan fidusia setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Nomor 2/PUU-XIX/2021 memberi tafsir baru terhadap konstitusi.

Kata Kunci: Kepastian Hukum, Eksekusi Objek Jaminan Fidusia, Putusan Mahkamah Konstitusi

ABSTRACT

Name : Toharudin

Study Program : Master of Notary

Fiduciary guarantees are security rights for movable objects, both tangible and intangible and immovable objects, especially buildings that cannot be encumbered with mortgage rights as referred to in the Law on Mortgage on land and objects related to land that remain in control of the fiduciary giver, as a means for the repayment of certain money, which gives priority to the fiduciary recipient over other creditors. The execution of Fiduciary Guarantees is regulated in Articles 29 to 34 of the Law on Fiduciary Guarantees. Execution of Fiduciary Guarantee is the confiscation and sale of objects that are the object of the Fiduciary Guarantee due to the debtor's default or not fulfilling his performance on time to the creditor. In order for the writing to be directed, the formulation of the problem is as follows: How is the execution of fiduciary guarantees against defaulted debtors. (execution of the object of fiduciary security before the Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019 and Number 2/PUU-XIX/2021), How is the legal certainty regarding the execution of fiduciary guarantee objects after the Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019 and Number 2/PUU-XIX/2021. The research method used in writing this thesis is normative juridical, meaning that the law is conceptualized as what is written in legislation or the law is conceptualized as a rule or norm which is a benchmark for human behavior that is considered appropriate. This normative legal research is based on primary and secondary legal materials, namely research that refers to the norms contained in the legislation. The conclusion of this paper is as follows: The procedure for granting credit with a fiduciary guarantee is a series of interrelated activities to complete a job, namely channeling credit to parties who need financing. The existence of a credit granting procedure is applied to determine whether or not the prospective debtor is given a financing credit, so that the risk of bad credit can be minimized as small as possible; The position of the fiduciary guarantee in the event of a breach of contract. The Fiduciary Recipient has the right to take objects that are the object of the Fiduciary Guarantee and if necessary can ask for assistance from the competent authorities. The execution of fiduciary guarantees after the Constitutional Court Decisions Number 18/PUU-XVII/2019 and Number 2/PUU-XIX/2021 gave a new interpretation of the constitution.

Keyword: Legal Certainty, Execution of Fiduciary Guarantee Objects, Constitutional Court Decisions